

**KOMUNIKASI PERSUASIF SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Reza Saputra
NPP. 31.0242

*Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: rezas26112001@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The Civil Service Police Unit carries out its duties in accordance with applicable local regulations. The main goal is to create order which is the right of the whole society. However, in carrying out its duties, Satpol PP sometimes has to regulate those who violate the rules by force. Persuasive communication is considered as an alternative to overcome the situations mentioned earlier. Persuasive communication is an attempt to influence the views, opinions, and actions of others, either through words or actions that are not verbal. **Purpose:** The focus of this study is to describe persuasive communication between members of the Civil Service Police Unit who patrol the field with the community, efforts faced by the Civil Service Police Unit to improve persuasive communication in regulating street vendors and obstacles in conducting persuasive communication with street vendors to control. **Method:** The research method used is a qualitative descriptive method with an inductive approach. The data sources for this study are primary and secondary sources. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and data verification. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. **Result:** Persuasive Communication of the Civil Service Police Unit in regulating street vendors to argue, the psychological appeal and credibility appeal of a member of the Palembang City Civil Service Police Unit is not too optimal in dealing with a problem. **Conclusion:** There needs to be special training in an effort to improve the knowledge and skills of the Civil Service Police Unit in order to be able to carry out more persuasive and humane control. **Keywords:** Persuasive Communication, Satpol PP, Street Vendors, Control.

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Tujuan utamanya adalah menciptakan ketertiban yang merupakan hak dari seluruh masyarakat. Namun, dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP terkadang harus melakukan penertiban terhadap mereka yang melanggar aturan dengan terpaksa. Komunikasi persuasif dianggap sebagai alternatif untuk mengatasi situasi-situasi yang telah disebutkan sebelumnya. Komunikasi persuasif adalah upaya untuk memengaruhi pandangan, pendapat, dan tindakan orang lain, baik melalui kata-kata maupun tindakan yang tidak bersifat verbal. **Tujuan:** Fokus dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan komunikasi persuasif antara anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berpatroli di lapangan dengan masyarakat, upaya yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan komunikasi persuasif dalam penertiban pedagang kaki lima dan hambatan dalam melakukan komunikasi persuasif dengan pedagang kaki lima untuk melakukan penertiban. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima untuk berargumen, daya tarik psikologis dan daya tarik kredibilitas seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang belum terlalu optimal dalam menangani suatu permasalahan. **Kesimpulan:** Perlu adanya pelatihan khusus dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat melaksanakan penertiban yang lebih persuasif serta humanis.

Kata kunci: Komunikasi Persuasif, Satpol PP, Pedagang Kaki Lima, Penertiban.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat bertugas, Satuan Polisi Pamong Praja mengikuti semua peraturan daerah. Menertibkan, yang merupakan hak setiap orang, adalah tujuan utama Satuan Polisi Pamong Praja. Namun terkadang dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP harus memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan karena perintah. Banyak yang mengasosiasikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan penggusuran, perusakan bangunan liar, hingga pengusiran pedagang kaki lima. Karena itu, banyak pihak yang memandang Satpol PP sebagai musuh sosial. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berhadapan dengan sejumlah kendala dalam menegakkan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) di berbagai kota. Salah satu permasalahan yang kerap muncul adalah resistensi dari para PKL yang menolak untuk dipindahkan atau diatur ulang lokasinya. Mereka seringkali mempertahankan posisi mereka karena berbagai alasan, termasuk lokasi jualan yang strategis atau kesulitan mencari pekerjaan alternatif. Selain itu, aspek sosial dan ekonomi juga memengaruhi dinamika penertiban PKL. Banyak PKL yang bergantung pada kegiatan jualannya sebagai sumber penghasilan utama. Oleh karena itu, kebijakan penertiban PKL dapat memiliki dampak langsung pada kondisi ekonomi mereka. Meskipun penertiban bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan kota, namun dampak sosial dan ekonomi terhadap PKL seringkali menjadi perhatian, memunculkan diskusi di masyarakat tentang pentingnya mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak terlibat.

Biasanya terjadi perdebatan mengenai perlu atau tidaknya ada anggota Satpol PP. Di satu sisi, tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menjaga ketertiban sangatlah penting. Namun, di sisi lain tindakan mereka yang sering kali dikaitkan dengan kekerasan menjadi suatu masalah yang sulit untuk diatasi. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kompas, mayoritas responden (sekitar 78,1 persen) menyatakan bahwa situasi yang paling berpotensi menciptakan ketegangan di lapangan yang melibatkan aparat Satpol PP adalah saat mereka melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima. (Wahyu, 2021)

Kemajuan Kota Palembang sangat terbantu dengan hadirnya PKL atau pedagang kaki lima. Sebagai sumber pendapatan daerah dan penyedia barang kebutuhan pokok bagi masyarakat kelas bawah dan menengah, mereka berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat. Selain itu, PKL di Kota Palembang dapat membantu meringankan krisis pengangguran. Namun, keberadaan PKL juga dapat mengakibatkan dampak negatif yang perlu diperhatikan. Banyak dari mereka beroperasi secara ilegal di ruang terbuka publik yang seharusnya tidak digunakan untuk berjualan. Hal ini dapat menimbulkan masalah terkait dengan kebersihan kota, kemacetan lalu lintas dan penampilan kota yang tidak rapi jika tidak diatur dan dikelola dengan baik. Selain itu, situasi ini tidak selaras dengan visi kota yang lebih menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapian sebagai prioritas utama.

Menjaga lingkungan kerja yang aman bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi prioritas utama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Oleh karena itu, penulis akan memusatkan pembahasannya pada cara anggota Satpol PP berkomunikasi. Langkah pertama dalam membangun ketertiban dan

menghindari kekerasan adalah komunikasi. Dengan demikian, sesuai uraian di atas penulis akan memaparkan dalam skripsi yang berjudul “Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.”

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pedagang Kaki Lima juga merupakan bagian berharga dari komunitas, dan pemerintah seharusnya memberikan mereka perlakuan yang sama seperti warga negara pada umumnya. Mereka berhak mendapatkan perlakuan yang adil, manusiawi dan perlindungan yang layak. Dalam konteks penertiban, tugas anggota Satpol PP seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang lebih manusiawi, dengan mengedepankan komunikasi persuasif sebagai metode utama. Di Kota Palembang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) belum mencapai tingkat pengendalian PKL yang ideal. Komunikasi Satpol PP yang tidak efisien dan sering menggunakan bahasa yang tidak sopan dan terkesan kasar menjadi permasalahan utama. Karena itu, Satpol PP dan masyarakat kerap terlibat tawuran atau kerusuhan.

Tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah komunikasi, oleh karena itu kajian terhadap permasalahan ini penting dilakukan. Perselisihan dan gangguan yang disebabkan oleh kesalahpahaman dapat meningkat menjadi konfrontasi fisik. Dalam menjalankan tugasnya, petugas polisi pamong praja sering kali menggunakan kekerasan fisik. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menertibkan Kota Palembang, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan PKL. Menjaga ketertiban sangatlah penting, terlepas dari apakah toko diizinkan atau tidak. Komunikasi persuasif yang dilakukan Satpol PP bertujuan untuk mewujudkan perdamaian di masyarakat tanpa menimbulkan ketidaknyamanan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan oleh Sartika dkk pada tahun 2019 dengan judul “Strategi Komunikasi Humas Satuan Polisi Pamong Praja Jambi Menjaga Ketertiban Pedagang Kaki Lima.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Komunikasi Humas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban Pedagang Kaki Lima dengan menggunakan metode penelitian kualitatif (Sartika et al., 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Rosita Tri Yulianti dengan judul “Gaya Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Keputran Utara Surabaya” pada tahun 2019 yang bertujuan untuk mendeskripsikan gaya komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima Pasar Keputran Utara Surabaya (Yulianti, 2019). Dalam penelitian yang berjudul “Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya dalam Menertibkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial” pada tahun 2020 yang diteliti oleh Arifah Putri Sabillah dan Fitriani Widiyani Roosinda dengan metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas komunikasi persuasif Satpol PP Kota Surabaya dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial (Sabillah & Roosinda, 2020). Pada tahun 2021. Gleydies Natalia Soyawan, Lingkana Easter Tulung, dan Leviane Jackelin Hera Lotulung melakukan penelitian dengan judul “Gaya Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar 45 Kota Manado.” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami gaya komunikasi yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Manado dalam proses penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar 45 Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya komunikasi yang diterapkan oleh Satpol PP berpengaruh signifikan terhadap kinerja penertiban di Pasar 45 Kota Manado. Penelitian ini memberikan harapan agar Satpol PP dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka terkait dengan berbagai gaya komunikasi yang dapat diterapkan (Soyawan et al., 2022). Penelitian yang dilakukan pada tahun 2023 oleh Restu Ragyl Hariyanto dengan judul “Fungsi Komunikasi Dalam Penertiban

Pedagang Kaki Lima Di Waterfront City Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun fungsi komunikasi terkait dengan Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Umum sudah diimplementasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, namun pencapaian tujuan tersebut masih belum optimal (Hariyanto, 2023).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam penelitian sebelumnya, terdapat peluang yang belum tersentuh secara memadai yang akan dijelajahi oleh penulis. Ini terutama berkaitan dengan aspek komunikasi persuasif dalam konteks Satuan Polisi Pamong Praja, yang belum banyak diteliti, terutama di Kota Palembang. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi dengan mengisi kekosongan penelitian yang terlihat dalam literatur. Fokus penelitian ini adalah komunikasi persuasif yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam menganalisis komunikasi yang ada, penelitian akan mengadopsi teori komunikasi persuasif yang dijelaskan oleh DeVito (2019).

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana Satpol PP berhasil menertibkan PKL di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan melalui penggunaan komunikasi persuasif. Disamping itu juga untuk mengetahui tantangan yang dihadapi Satpol PP Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pengelolaan PKL melalui penggunaan komunikasi persuasif. Serta mendeskripsikan upaya yang dilakukan Satpol PP Kota Palembang untuk meningkatkan komunikasi persuasif dalam penertiban PKL.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan menganalisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:246)). Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, Kepala Bidang Operasional dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, Kepala Seksi Operasional, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang sebanyak 2 orang, Pedagang Kaki Lima di Kota Palembang sebanyak 2 orang dan masyarakat Kota Palembang sebanyak 2 orang. Adapun analisisnya menggunakan teori dari De Vito yaitu komunikasi persuasif (De Vito, 2019) yang menyatakan bahwa komunikasi persuasif dapat dibagi menjadi 3 (tiga) alat utama yaitu memperkuat argumen, daya tarik psikologis, dan daya tarik kredibilitas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Palembang

Untuk mengetahui bagaimana komunikasi persuasif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang penulis telah melakukan pengamatan yang mengacu pada komunikasi persuasif yang dikemukakan oleh De Vito yaitu memperkuat argumen, daya tarik psikologis dan daya tarik kredibilitas. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

1. Memperkuat Argumen

Kecerdasan Komunikator. Dengan memahami permasalahan secara mendalam, anggota Satpol PP

dapat lebih mudah menemukan solusi yang tepat dan efektif untuk mengatasi masalah yang timbul. Meningkatkan kemampuan anggota Satpol PP dalam menangani penertiban pedagang kaki lima diperlukan kombinasi antara kemampuan mengelola emosi dan penguasaan terhadap permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif dan menghasilkan solusi yang lebih baik dalam menangani konflik dengan pedagang kaki lima.

Informasi. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang harus memiliki anggota yang dijadikan sebagai komunikator, harus memiliki kemampuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan terperinci kepada para pedagang kaki lima. Informasi yang diberikan harus mencakup lokasi penertiban, peraturan yang dilanggar, serta langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah kota.

Kompetensi. Penertiban pedagang kaki lima di Kota Palembang memerlukan kompetensi komunikasi yang menjadi krusial bagi anggota Satpol PP. Mereka harus mampu menghadapi situasi yang mungkin memicu konflik dengan pedagang kaki lima secara bijaksana dan efektif. Hal ini mencakup penggunaan pengetahuan yang luas tentang peraturan dan kebijakan terkait penertiban, serta pengalaman dalam menangani situasi serupa. Hasil penelitian yang didapat dari berbagai narasumber menunjukkan bahwa kompetensi yang ditunjukkan oleh anggota Satpol PP dalam menangani penertiban pedagang kaki lima memerlukan pendekatan tambahan yang mendalam.

Kewibawaan. Kewibawaan anggota Satpol PP dalam konteks penertiban pedagang kaki lima di Kota Palembang mencakup kemampuan dalam mengontrol emosi, menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif, serta memberikan solusi yang tepat. Hal ini menjadi penting untuk membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah kota dan para pedagang kaki lima, serta mencapai tujuan penertiban dengan cara yang adil dan transparan.

2. Daya Tarik Psikologis

Verbal. Penanganan terhadap keluhan atau protes dari para pedagang harus dilakukan dengan penuh empati dan kesabaran, tanpa menunjukkan sikap yang kasar atau jutek. Pentingnya komunikasi verbal yang baik juga mencakup interaksi tulisan, terutama dalam komunikasi yang dilakukan melalui surat atau media elektronik. Pesan-pesan yang disampaikan secara tertulis haruslah jelas, sopan, dan menghormati para pedagang kaki lima, sehingga dapat meminimalkan salah paham dan konflik yang mungkin timbul. Permasalahan penertiban pedagang kaki lima di Kota Palembang, penting juga bagi anggota Satpol PP untuk memperhatikan kualitas komunikasi verbal mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKL di Kota Palembang cenderung merespon lebih baik terhadap instruksi atau penjelasan yang disampaikan dengan nada bicara yang santun dan tegas. Sesuai dengan temuan semua narasumber, pentingnya pengendalian nada bicara anggota Satpol PP saat berinteraksi dengan PKL sangat ditekankan. Penyampaian instruksi atau penjelasan dengan nada bicara yang kurang baik dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada pihak PKL, sehingga dapat mempengaruhi respons mereka terhadap penertiban yang dilakukan.

Vokal. Suara bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga memiliki peran dalam memengaruhi perilaku dan respon individu. Dalam konteks interaksi antara anggota Satpol PP dan PKL, suara yang digunakan dapat mempengaruhi bagaimana PKL menerima dan merespons penertiban yang dilakukan. Oleh karena itu, penting bagi anggota Satpol PP untuk memperhatikan kualitas suara dan intonasi yang digunakan dalam memberikan instruksi atau penjelasan kepada PKL. Penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan suara atau vokal, termasuk intonasi dan variasi suara, memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi respons dan kepatuhan dari PKL. Oleh karena itu, penting bagi anggota Satpol PP untuk memperhatikan kualitas suara yang digunakan dalam berinteraksi dengan PKL guna meningkatkan efektivitas penertiban dan memperkuat hubungan antara kedua belah pihak.

Visual. Selanjutnya komunikasi visual atau nonverbal, termasuk gerakan tubuh, sering digunakan oleh pegawai Satpol PP dalam berinteraksi dengan PKL. Gerakan tubuh ini dapat memiliki makna

tersendiri dan dapat memperkuat atau menggantikan pesan verbal yang disampaikan. Bahasa tubuh merupakan aspek penting dalam interaksi antara anggota Satpol PP dan PKL di Kota Palembang. Pemahaman yang baik terhadap komunikasi nonverbal dapat membantu meningkatkan efektivitas penertiban dan memperkuat hubungan antara kedua belah pihak, sehingga memungkinkan terciptanya interaksi yang lebih harmonis dan produktif dalam penertiban PKL.

3. Daya Tarik Kredibilitas

Keahlian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keahlian yang dianggap penting oleh narasumber adalah kemampuan anggota Satpol PP dalam mengatur emosi pelanggan yang sedang mengadukan permasalahan dengan emosi yang tinggi. Dalam hal ini, keahlian tersebut menjadi faktor penentu dalam membangun kredibilitas dan kepercayaan para PKL terhadap anggota Satpol PP. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya keahlian anggota Satpol PP dalam menangani permasalahan penertiban PKL di Kota Palembang. Selain kemampuan berkomunikasi, keahlian dalam mengatur emosi dan merespons dengan bijak terhadap situasi yang mungkin menimbulkan konflik merupakan faktor krusial dalam memastikan efektivitas penertiban serta menjaga hubungan yang harmonis antara anggota Satpol PP dan PKL.

Keterpercayaan. Keterpercayaan (trustworthiness) juga menjadi faktor penting keterpercayaan merupakan aspek yang memegang peranan penting dalam penanganan konflik antara anggota Satpol PP dan penertiban pedagang kaki lima. Keterpercayaan dibangun melalui sejumlah faktor yang melibatkan kedua belah pihak dalam interaksi mereka.

Daya Tarik atau Kesukaan. Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam konteks penertiban PKL oleh anggota Satpol PP, daya tarik atau kesukaan juga menjadi faktor penting. Para anggota Satpol PP yang mampu menjelaskan dan menyampaikan informasi kepada PKL dengan tepat dan mengalami akan lebih mampu membangun hubungan yang baik dan memperoleh kepercayaan dari PKL. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep daya tarik kredibilitas juga berperan dalam interaksi antara anggota Satpol PP dan PKL di Kota Palembang. Para anggota Satpol PP yang mampu memancarkan daya tarik kredibilitas melalui penjelasan yang jelas, pengalaman yang memadai, dan sikap yang terbuka dan tulus, akan lebih berhasil dalam memengaruhi dan memperoleh kerjasama dari PKL dalam proses penertiban..

3.2. Faktor Penghambat untuk Meningkatkan Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Palembang

Hasil pengamatan dan wawancara menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam menjalankan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, yakni:

1. Kehadiran Pedagang Kaki Lima yang kurang patuh dan sulit untuk diatur.
2. Kurangnya dukungan dari lingkungan masyarakat sekitar terhadap upaya penertiban Pedagang Kaki Lima.

3.3. Upaya yang Dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk Meningkatkan Komunikasi Persuasif dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Palembang

Adanya kendala-kendala yang seringkali menghambat pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang telah mengambil langkah-langkah yang strategis. Salah satunya adalah dengan membentuk Tim khusus yang bertugas melakukan pendekatan persuasif kepada PKL dan juga masyarakat sekitar. Tim ini memiliki jadwal yang telah ditetapkan untuk melakukan penertiban secara terencana dan bertahap.

Tugas utama dari Tim ini adalah tidak hanya melakukan penertiban terhadap PKL yang tidak tertib, tetapi juga menyosialisasikan peraturan-peraturan yang berlaku terkait lokasi dan waktu berjualan

yang diizinkan bagi PKL. Mereka berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada PKL dan masyarakat sekitar tentang pentingnya mematuhi aturan-aturan yang ada guna menciptakan ketertiban di lingkungan tersebut.

Selain itu, Tim ini juga bertugas memberikan teguran, baik secara lisan maupun tertulis, kepada PKL yang melanggar ketertiban. Pendekatan persuasif ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Namun, apabila pelanggaran terus berulang kali terjadi, Tim memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyitaan barang PKL untuk sementara waktu guna menegakkan ketertiban.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima secara persuasif dapat meningkatkan citra baik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Temuan penting yang ditemukan oleh penulis adalah strategi pembentukan Tim Khusus yang dijadwalkan untuk melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima secara lebih persuasif.

Diharapkan Tim Khusus ini dapat melakukan penertiban melalui pendekatan kepada para PKL dengan cara sosialisasi atau teguran. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa berjualan di ruang publik yang dilarang memiliki dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari para PKL untuk tidak melanggar aturan dan berjualan di tempat yang sudah dilarang.

IV. KESIMPULAN

Setelah melalui tahap pengolahan data, analisis mendalam, dan serangkaian wawancara yang dilakukan selama pelaksanaan penelitian, beberapa kesimpulan yang signifikan dapat ditarik sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian, peneliti berkesimpulan bahwa seorang anggota Satpol PP Kota Palembang belum terlalu optimal dalam melakukan komunikasi persuasif.
2. Kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Palembang, adalah :
 - a. Pedagang Kaki Lima yang tidak tertib dan sulit diatur,
 - b. Lingkungan masyarakat sekitar yang tidak mendukung pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima.
3. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang ada yaitu dengan dibentuknya Tim Khusus untuk menjalin komunikasi

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dalam penelitian. Kemudian lokus penelitian yang hanya dilakukan di Kota Palembang.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa temuan penelitian ini masih berada pada tahap awal. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan di lokasi serupa terkait penertiban pedagang kaki lima secara persuasif oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian lanjutan ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta.

Eviany Eva dan Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat*. PT. Nas Media Indonesia.

- Hendri, E. (2019). KOMUNIKASI PERSUASIF Pendekatatan dan Strategi (A. Holid (ed.); Pertama). PT REMAJA ROSDAKARYA.
- HM, J. (1999). Analisis & Desain Sistem Informasi. Andi Offset.
- Ismail, N. (2015). Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam.pdf. Samudra Biru.
- Moleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Raco. (2010). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Simangunsong, F. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan (ketiga). Alfabeta.
- Soeharto, M. (1992). Kamus Musik. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2007). Metode Penelitian dan Pendidikan. PT Remaja Rosdakarya.
- Wibowo. (2012). Manajemen Kinerja (Ketiga). PT. Raja Grafindo Persada.

B. JURNAL-JURNAL

- Wahyu, Y. (2021). Menghadirkan Satpol PP yang Lebih Humanis. Litbang Kompas. <https://www.kompas.id/baca/metro/2021/08/29/menghadirkan-satpol-pp-yang-lebih-humanis>
- Yulianti, R. T. (2019). Gaya Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Liar Di Pasar Keputran Utara Surabaya. Digilib.uinsby.ac.id
- Soyawan, G. N., Tulung, L. E., & Lotulung, L. J. H. (2022). Gaya Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar 45 Kota Manado. ACTA DIURNA KOMUNIKASI, 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Sartika, Pirhat abbas, Nurhasanah, & Mardalina. (2019). Strategi Komunikasi Humas Satuan Polisi Pamong Praja Jambi Menjaga Ketertiban Pedagang Kaki Lima. MAUIZOH: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi, 3(2), 1–20. <https://doi.org/10.30631/mauizoh.v3i2.23>
- Sabillah, A. P., & Roosinda, F. W. (2020). Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya dalam Menertibkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study, 6(2), 163–173. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v6i2.4089>
- Pamungkas, Z. S. (2015). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA MALANG (Study Kasus Pedagang Kaki Lima Di Wisata Belanja Tugu Kota Malang). Jurnal Ilmiah.
- Hariyanto, R. R. (2023). Fungsi Komunikasi dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Waterfrony City oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. <https://eprints.ipdn.ac.id>
- Harsan, I. W. (2017). Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar di Pasar Segiri Kota Samarinda. EJournal Ilmu Pemerintahan, 5(1), 145–158.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Satuan Polisi Pamong Praja (PP Nomor 16 Tahun 2018)
- Peraturan Walikota Palembang tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Peraturan Walikota Palembang Nomor 37 Tahun 2017)
- Peraturan WaliKota Palembang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Peraturan Walikota Palembang Nomor 71 Tahun 2016)

D. REFERENSI LAINNYA

Badan Pusat Statistik. “Badan Pusat Statistik Luas Daerah Dan Jumlah Pulau.” bps.go.id, 2022. <https://www.bps.go.id>.

Badan Pusat Statistik Kota Palembang. “Letak Geografis Dan Batas Wilayah Kota Palembang Geographical Lay And Limits Of Palembang City Region.” Palembangkota.bps.go.id, 2019.

<https://palembangkota.bps.go.id/statictable/2017/11/14/86/leak-geografis-dan-batas-wilayah-kota-palembang.html%0ABadan>.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. “Profil Sumatera Selatan.” sumselprov.go.id, 2021. <https://sumselprov.go.id/Profil-Sumsel/>.

